Ngedukung mogok?

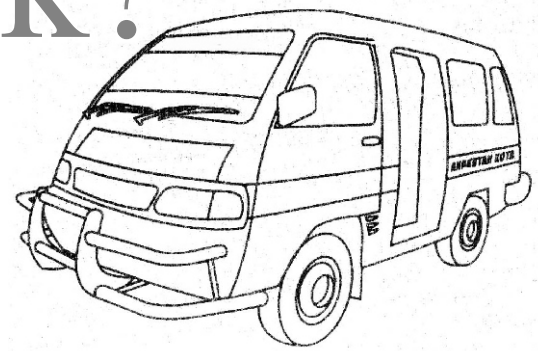

Melihat pada kasus pemogokan para buruh transportasi, ini sebenarnya menarik melihat bagaimana sebenarnya sistem ekonomi sangat bergantung pada beroperasinya sistem transportasi. Tanpa transportasi, para buruh-buruh di berbagai bidang kerja tak dapat melaksanakan aktifitasnya, yang artinya, tanpa transportasi ekonomi akan mati.

Pada dekade tahun 90-an di Australia juga sempat terjadi beberapa rentetan pemogokan oleh para buruh transportasi akibat kebijakan pemerintah setempat dianggap merugikan mereka dalam segi ekonomi. Tekanan yang diberikan juga sama, menuntut pemerintah untuk mengkaji ulang kebijakan barunya. Setelah melalui aksi pemogokan berulang-ulang dan intens, akhirnya pemerintah sedikit mengalah sehingga sebagian tuntutan dikabulkan. Nyaris sama dengan apa yang terjadi di Bandung.

Di Australia, para buruh transportasi tersebut saat melakukan pemogokan, mungkin akan lebih tepat apabila disebut bahwa mereka mogok melakukan pembayaran terhadap boss-boss mereka atas hasil kerja mereka seharian, tetapi tetap melakukan pengoperasian alat transportasi mereka. Relasi yang terjalin antara mereka dan para penumpang jelas terjaga, publik bersimpati terhadap mereka, terhadap kasus yang mereka hadapi, saat para penumpang pada hari-hari pemogokan tersebut dipersilahkan untuk menggunakan jasa trasnportasi dengan gratis, dengan diberi penjelasan mengenai kasus yang mereka perjuangkan. Publik berada di pihak mereka dalam perjuangannya melawan para pemilik modal dan negara. Seandainya perjuangan mereka bertambah sengit, maka dapat dipastikan bahwa para buruh transportasi tersebut akan mendapat dukungan publik yang juga hebat.

Pemogokan ini...
bukan terlantarin publik
tapi justru: gratisin angkot!

Sementara di Bandung kemarin? Para buruh transportasi tersebut menyerang pemerintah, tetapi tidak menyerang boss-boss mereka sendiri. Dan dalam prakteknya, aksi mereka juga malah semakin mengalienasikan mereka dari publik yang seharusnya dapat berdiri di pihak mereka, karena pilihan mereka untuk menterlantarkan kebutuhan publik akan transportasi. Kini, negara dan institusinya berdiri berseberangan dengan mereka, ditambah publik. Tak ada seorangpun yang berdiri di pihak mereka, bahkan boss merekapun justru mengambil keuntungan dari aksi tersebut, mereka tak perlu bersusah payah mencari cara agar tidak berkurang pendapatan hariannya dan membiarkan para buruh transportasi (yang notabene adalah sapi perahan mereka) memperjuangkan kepentingan para boss tersebut. Apabila aksi perjuangan tersebut seandainya berjalan bertambah sengit, maka yang ada hanyalah diri mereka sendiri. Publik akan dengan mudah berpihak kepada militer dan kepolisian yang biasanya dalam kasus pemogokan buruh transportasi akan segera menyediakan truk-truknya sebagai angkutan transportasi gratis. Sementara kita semua telah tahu, dimana militer dan polisi akan berpihak sebenarnya.

Sebenarnya posisi para awak Angkot yang beroposisi dengan publik telah jelas terlihat dalam kesehariannya, dimana saat mereka ditekan untuk mampu menyetorkan uang dalam jumlah tertentu kepada boss mereka-yang jelas menempatkan mereka dalam posisi konflik kepentingan-bukannya mereka melihat relasi konflik ini sebagai sebuah masalah utama, tetapi mereka melihatnya bahwa publiklah yang menjadi oposisi mereka, karena publik tidak membayarkan ongkos atas jasa mereka lebih besar. Pada akhirnya? Publik dikenakan biaya lebih besar apabila menggunakan jasa mereka. Konflik dengan publik jelas telah dikobarkan, sementara konflik utama antara mereka dengan boss tampaknya tak tersentuh. Apabila mereka menempatkan dirinya justru berkonflik dengan para boss, misalnya dengan melakukan pemogokan untuk menolak kenaikan biaya setoran harian mereka, dan membiarkan publik tetap menggunakan jasa transportasi mereka, maka jelas semuanya akan berbeda. Mereka akan berada dalam posisi berkonflik dengan boss mereka, dimana posisi perjuangan mereka akan didukung oleh publik.

Masa kini, kenyataan yang kita hadapi sehari-hari tetaplah sama, para buruh transportasi menjadi musuh publik. Berbagai kasus sosial-politik yang parah seperti kenaikan harga BBM misalnya, akan diprotes oleh para buruh transportasi hanya apabila biaya yang dikenakan bagi penumpang tidak secara resmi dinaikkan. Potensi konflik yang merugikan negara dan para pemodal tentu akan dengan mudah teratasi, pemerintah tinggal mengumumkan kenaikan tarif penumpang secara resmi, maka ancaman pemogokan buruh transportasi akan segera teratasi. Beres. Mereka dengan mudah akan berada di posisi negara, dengan berbagai aturannya, baik yang tak merugikan publik ataupun yang merugikan.

Dengan kata lain, kondisi tersebut telah menempatkan para buruh transportasi untuk berada seorang diri di tengah konflik antara pengemudi Angkot sebagai buruh transportasi dan para pemilik Angkot, yang sebenarnya semuanya dapat diatasi hanya apabila para pengemudi tersebut telah menentukan posisinya untuk berada bersama publik. Bukan justru memperkuat dan melanggengkan sistem ekonomi saat ini yang juga membuat pengemudi Angkot juga termiskinkan.

Pemogokan berikutnya...
bukan minta tarif dinaikkan
tapi justru: turunin setoran!

Konspirasi Kontra-Kultura
Biro Publik Non-Partai Politik, Non-LSM

www.kontra-kultura.tk
kontra-kultura@spymac.com